

**BAB II**  
**PERDAGANGAN DAN PENYELUNDUPAN TEKSTIL**  
**ASAL TIONGKOK DI INDONESIA TAHUN 2015-2017**

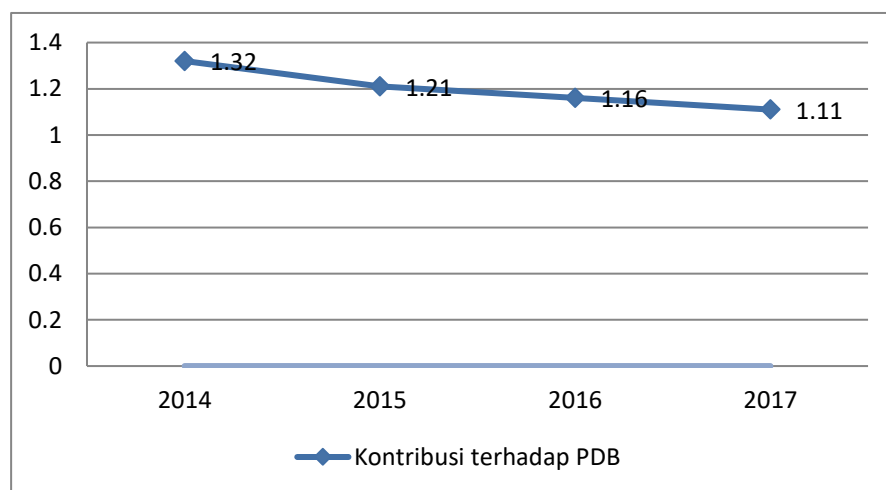
Tiongkok dan Indonesia telah memiliki kerjasama perdagangan yang telah dijalankan sejak lama. Kedua negara tersebut sama-sama membutuhkan sumber daya satu sama lain yang saling melengkapi. Salah satu perdagangan yang dilakukan oleh kedua negara ini adalah perdagangan tekstil. Setiap tahun perdagangan tekstil mendatangkan keuntungan yang cukup signifikan bagi kedua belah pihak. Namun perdagangan ini memiliki catatan yang kurang baik terkait penyelundupan tekstil yang terjadi.

Sebagai mitra dagang yang saling menguntungkan, penyelundupan tekstil yang umumnya terjadi dari Tiongkok ke Indonesia ini menimbulkan kerugian negara yang cukup besar karena tekstil selundupan yang umumnya melalui pelabuhan ilegal dan dengan tidak memiliki dokumen resmi dari negara asal. Padahal untuk meningkatkan kerjasama perdagangan antar kedua negara, Indonesia dan Tiongkok telah memiliki perjanjian ASEAN-China *Free Trade Agreement* yang didalamnya memiliki kesepakatan dan aturan yang memudahkan serta menguntungkan kedua belah pihak, salah satunya berupa pengurangan pajak pada barang ekspor maupun impor. Namun hal ini belum cukup menghentikan laju penyelundupan tekstil yang berasal dari Tiongkok ke Indonesia.

## 2.1 Kondisi Perdagangan Tekstil di Tiongkok dan Indonesia

Tekstil merupakan salah satu komoditas perdagangan yang memiliki nilai ekspor dan impor penunjang neraca perdagangan di hampir seluruh negara-negara Asia maupun Eropa. Tekstil banyak berkembang dan menjadi komoditas perdagangan unggulan terutama di negara-negara yang memiliki bahan baku tekstil seperti kapas dan serat benang. Dari perkembangan tekstil yang setiap tahun selalu berkembang, Tiongkok dan Indonesia merupakan contoh negara yang memiliki perdagangan tekstil tertinggi di dunia. Bagi Indonesia, tekstil merupakan komoditas unggulan yang setiap tahunnya mendapat tempat di posisi teratas ekspor nasional. Global Business Indonesia (2014) menyatakan bahwa perdagangan tekstil merupakan pemasok hampir 2% pendapatan bersih negara atau *Gross Domestic Product* (GDP) dan menghasilkan 7% perolehan dari total ekspor nasional pada tahun 2013.

**Grafik 2.1 Kontribusi Tekstil terhadap PDB (dalam persen %) tahun 2014 – 2017**



Sumber : Kementerian Perindustrian RI, 2016.

Dari data grafik diatas dapat dilihat kontribusi hasil penjualan tekstil Indonesia terhadap PDB negara pada tahun 2014 sampai tahun 2017. Pada tahun 2014, tingkat kontribusi tekstil pada PDB negara mencapai 1,32% lalu mengalami penurunan sebesar menjadi 1,21% pada tahun 2015 dan mengalami penurunan lagi sebesar 5% pada tahun 2016 menjadi 1,16%. Lalu mengalami penurunan lagi menjadi 1,11% pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan penurunan yang terjadi pada perdagangan tekstil Indonesia dari tahun 2014 sampai 2017 memiliki kontribusi penuh pada PDB negara. Selain itu grafik diatas juga menunjukkan adanya penurunan perdagangan tekstil Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2017 yang terjadi secara terus menerus.

Tabel 2.1 juga menunjukkan kontribusi perdagangan tekstil Indonesia dalam pendapatan negara dari tahun 2014 hingga 2017, pendapatan nasional, kontribusinya, dan pertumbuhan tekstil.

**Tabel 2.1 Tingkat Kontribusi Perdagangan Tekstil Indonesia dalam Pendapatan Negara, Kontribusi, dan Pertumbuhan Tekstil**

	2014	2015	2016	2017
Pendapatan Perdagangan Tekstil	Rp.139,03 Triliun	Rp.139,39 Triliun	Rp.143,48 Triliun	Rp.150,43 Triliun
Nasional	Rp.10,542.69 Triliun	Rp.11,540.79 Triliun	Rp.12,406.81 Triliun	Rp.13,588.61 Triliun
Pertumbuhan Tekstil	1,53%	-4,79%	-0,09%	3,76%

Sumber : Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), 2018.

Data-data yang tertera pada tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari perdagangan tekstil yang selalu menunjukkan kenaikan dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Namun hal ini belum seimbang dengan kontribusi pada pendapatan nasional yang menunjukkan penurunan dari tahun 2015 sampai 2017. Selain itu pertumbuhan tekstil nasional juga masih berfluktuatif dimana tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami minus yang cukup banyak. Sama halnya dengan tahun 2016 namun dapat tertolong dengan kenaikan di tahun 2017. Hal ini mengakibatkan tingkat pertumbuhan dan ekspor tekstil Indonesia masih belum menunjukkan keseimbangan dengan pendapatannya.

Di sisi lain, Tiongkok sebagai negara yang saat ini sedang naik menjadi negara dengan ekonomi terbesar dunia, telah unggul dalam sektor pertekstilan dunia sejak tahun 2013. Bahkan dari tahun 2011, Tiongkok sendiri telah menguasai perdagangan tekstil dunia sebesar 42%. Bersama dengan Uni Eropa di peringkat kedua dan India di peringkat ketiga, Tiongkok tetap kokoh menduduki posisi pertama sebagai negara pengeksport tekstil terbesar didunia pada tahun 2015. Secara keseluruhan, perdagangan tekstil ketiga negara tersebut menyumbang hampir dua pertiga ekspor dunia (World Trade Organizations, 2016).

Tingginya angka pendapatan negara yang didapat dari perdagangan tekstil di kedua negara tersebut menimbulkan kesimpulan bahwa perdagangan tekstil menempati posisi penting dalam menunjang perekonomian negara. Untuk lebih memahami kondisi perdagangan tekstil di Tiongkok dan Indonesia baik dari

perdagangan domestik, ekspor, impor, serta perdagangan antar kedua negara dan dengan ASEAN.

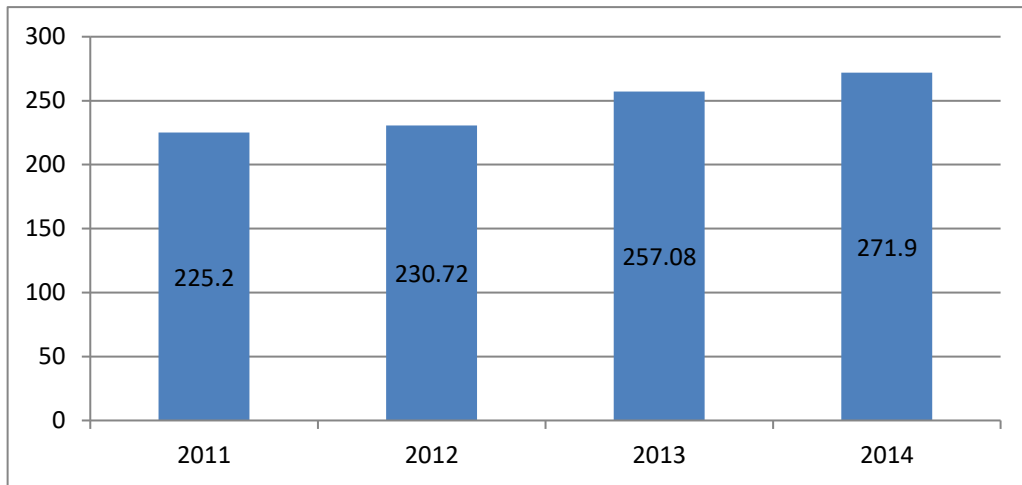
### **2.1.1 Perdagangan Tekstil Tiongkok**

Tiongkok merupakan mitra yang tepat bagi Indonesia dalam mengembangkan perdagangan terutama untuk tekstil dan produk tekstil (TPT) . Hal ini dapat dilihat dari sejarah yang telah mencatat bahwa pedagang Tiongkok sejak 300 SM membuat "*Silk Road*" yang membentang diantara dua benua serta menghubungkan Tiongkok dan dunia barat, yang zaman dulu dipakai sebagai rute perdagangan melalui darat.

Seiring perkembangan jaman, jalur perdagangan *Silk Road* Tiongkok mengalami perkembangan dengan memunculkan jalur maritim yang melewati sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Hal ini juga mengakibatkan perdagangan antara Tiongkok dan negara – negara tetangganya menjadi sangat efektif dan berkembang pesat. Kemudahan transportasi melalui jalur ini juga menjadi salah satu faktor perdagangan Tiongkok yang sampai saat ini menjadi salah satu yang paling unggul menyaingi Amerika Serikat.

Tiongkok sendiri telah menguasai perdagangan tekstil global selama lebih dari 20 tahun. Tiongkok tidak hanya menguasai ekspor tekstil, namun juga garmen. Pangsa pasar negeri Tiongkok untuk pasar tekstil adalah sebesar 36%, diikuti oleh Uni Eropa, India, Amerika dan Turki. Sedangkan pangsa pasar Tiongkok untuk garmen adalah sebesar 39% , diikuti oleh Uni Eropa, Bangladesh, Hongkong dan Vietnam.

**Grafik 2.2 Neraca Perdagangan Tekstil Tiongkok 2011 – 2014**



Sumber : World Trade Organizations, 2017

Data pada Grafik 2.2 dapat diketahui bahwa nilai perdagangan tekstil Tiongkok dari tahun 2011 sampai 2014 selalu mengalami kenaikan. Dengan nilai yang selalu mencapai diatas US\$ 200 Milyar pertahun, tekstil Tiongkok mampu menjadi sorotan eksportir tekstil negara-negara lain dengan nilai pendapatannya yang selalu meningkat. Di tahun 2014 sendiri, surplus perdagangan Tiongkok telah mencapai US\$271,9 milyar atau delapan kali lipat dari surplus perdagangan negara kedua terbesar yaitu India. Surplus perdagangan India di tahun 2014 mencapai US\$31.71 milyar (Harini, 2017).

Dengan posisinya sebagai salah satu eksportir tekstil terbesar di dunia, Tiongkok bahkan pernah menguasai lebih dari sepertiga arus perdagangan tekstil dunia pada 2016 dengan nilai US\$249 miliar. Sementara itu, total perdagangan tekstil di seluruh dunia sendiri tahun silam menyentuh angka US\$720 miliar (Teodore Fau, 2017). Besarnya nilai perdagangan tekstil di Tiongkok didorong oleh ketergantungan negara di dunia akan impor tekstil dari negara ini. Selain itu,

ada tiga alasan mengapa Tiongkok kerap menjadi pilihan impor produk tekstil negara-negara dunia. Pertama adalah beragamnya varian produk yang ditawarkan, kedua adalah waktu pengiriman yang cepat dan tepat, dan yang terakhir adalah harga yang bersaing (Faisal Rachman, 2017). Dari ketiga hal yang membuat Tiongkok menjadi penguasa ekspor tekstil di dunia, waktu pengiriman menjadi sebab utama negara-negara pasar utama tekstil dunia memilih bahan baku dari negeri ini.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat (2015), juga memberikan pernyataan bahwa Tiongkok dapat melakukan ekspor dengan biaya rendah karena kapasitas yang dimiliki besar dan selalu efisien di dalam pengelolaan energinya. Pengelolaan logistik Tiongkok juga sangat memadahi yang disertai dengan pengelolaan macam-macam pelayanan kepelabuhan, dan perpajakan yang dijalankan secara efisien. Efisiensi yang dimiliki Tiongkok dalam mengelola perdagangan tekstilnya dapat terlihat pula dari usahanya dalam mencetak bahan dasar untuk olahan bahan baku tekstilnya. Karena alasan ini pulalah, Tiongkok disebut-sebut sebagai pencetak *raw materials* tekstil terbesar di dunia.

Tiongkok juga memiliki komoditas unggulan yang menjadi salah satu sektor penting perdagangan tekstil dunia, yaitu katun yang terbuat dari serta kapas. Berdasarkan data *United Nations Comtrade* (2016), ekspor Tiongkok terhadap berbagai olahan dan produk dari serat kapas atau yang dikenal dengan istilah katun mencapai angka US\$14,96 miliar pada tahun 2016 di seluruh dunia. Volumennya sendiri mencapai angka 1,73 juta ton. Selain itu keberhasilan

perdagangan tekstil di Tiongkok sendiri tidak hanya dirasakan bagi negara-negara tetangganya dan khususnya negara-negara di kawasan Asia. Namun, perdagangan tekstil asal Tiongkok ini telah mengekspor produk tekstil mereka sebesar 30% ke berbagai penjuru pasar internasional.

Salah satu negara yang menjadi tujuan ekspor tekstil terbesar Tiongkok adalah Korea Utara. Menurut penuturan juru bicara pabean Tiongkok, Huang Songping (2017), ekspor China ke Korea Utara meningkat hampir 30% menjadi US\$ 1,67 miliar pada paruh pertama tahun ini. Sebagian besar barang ekspor tersebut didorong oleh bahan tekstil dan barang padat karya tradisional lainnya yang tidak termasuk dalam daftar embargo PBB. Perdagangan tekstil dan garmen asal tersebut menunjukkan sejauh mana Korea Utara bergantung pada Tiongkok sebagai jalur kehidupan ekonominya. Pemasok Tiongkok mengirim kain dan bahan mentah lainnya yang dibutuhkan untuk membuat pakaian ke pabrik-pabrik Korea Utara di seberang perbatasan tempat pakaian dirakit dan diekspor (Rosalina, 2017).

### **2.1.2 Perdagangan Tekstil Indonesia**

Sejak tahun 1986, industri tekstil di Indonesia mulai menunjukkan perkembangannya. Perdagangan tekstil di Indonesia pun mulai tumbuh pesat dengan ditandai dengan faktor iklim usaha efektif serta sudah menjajaki fokus kebutuhan ekspor ke negara lain. Sampai tahun 1997, perdagangan tekstil Indonesia terus meningkat dan memberikan bukti yang signifikan terhadap peningkatan devisa negara di sektor non-migas. Hal ini berlanjut di tahun-tahun



berikutnya yang semakin memberikan kontribusi kepada pendapatan negara yang semakin meningkat dengan perdagangan tekstil.

Di Indonesia, industri tekstil yang menjadi komoditi perdagangan domestik maupun ekspor dibagi menjadi tiga sektor yang terintegrasi dari hulu ke hilir (Handriani, 2010), yaitu (a) Sektor Industri Hulu (*upstream*), adalah industri yang memproduksi serat/fober dan proses pemintalan menjadi produk benang; (b) Sektor Industri Menengah (*Midstream*), meliputi proses penganyaman benang menjadi kain mentah lembaran melalui proses pertenunan dan rajut yang kemudian diolah lebih lanjut melalui proses pengolahan pencelupan, penyempurnaan, dan pencapan menjadi kain jadi; (c) Sektor Industri Hilir (*downstream*), adalah industri manufaktur pakaian jadi (*garmen*).

Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) DKI Jakarta, Hasan Basri (2015), menyatakan bahwa jaringan tekstil yang beredar di Indonesia memiliki keistimewaan karena para pedagang tekstil dapat melakukan bisnis tersebut tanpa modal besar yang cukup signifikan seperti usaha lain. Modal perdagangan tekstil hanya memerlukan kepercayaan antar pedagang yang ingin melakukan bisnis dan kerjasama.

Menurut Kementerian Perindustrian (2016), output dari perdagangan tekstil mampu memenuhi 70% kebutuhan sandang nasional. Sisanya dijual ke pasar mancanegara dan mampu menempatkan sektor tekstil di peringkat tiga nasional dari segi nilai ekspor. Adapun negara-negara tujuan ekspor tekstil Indonesia yaitu Amerika Serikat, Belanda, Perancis, Jerman, dan Jepang.

Perdagangan tekstil Indonesia telah menunjukkan kinerja positif baik di pasar internasional maupun domestik dengan kontribusinya sebesar 6,65% dari *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia pada tahun 2016 dan menunjukkan pertumbuhan rata-rata 5,2% hingga 5,4% pada tahun 2017. Menurut laporan Kementerian Perindustrian (2017), perdagangan tekstil yang diekspor mampu mendatangkan devisa negara sebesar US\$ 11,87 miliar atau bernilai 8,2% dari total ekspor nasional pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017, laju pertumbuhan dari sektor yang berorientasi pada padat karya ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,92% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar 0,13%.

Kenaikan pendapatan juga terjadi pada hasil dari ekspor tekstil yang mendatangkan keuntungan sebesar US\$ 7,12 miliar atau naik 2,71% sampai bulan Juli 2017. Airlangga Hartanto (2017), Menteri Perindustrian RI, menyatakan bahwa pada periode Januari hingga Februari 2017 ekspor tekstil Indonesia mencapai US\$ 2 miliar. Sedangkan periode selanjutnya hingga bulan Mei 2017 naik menjadi US\$ 5,11 juta atau mengalami kenaikan sebesar 3,40% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

**Grafik 2.3 Total Ekspor dan Nilai Ekspor Produk Tekstil Indonesia Tahun 2007 – 2016**



Sumber : diolah dari [www.trademap.org](http://www.trademap.org), 2017.

Seperti yang dapat dilihat dalam Grafik 2.3 diatas, tekstil Indonesia yang memiliki tingkat ekspor cukup tinggi yaitu jenis produk benang serat stapel sintesis (HS 5509) dimana dari produk tekstil tersebut membawa Indonesia menjadi eksportir kedua di dunia. Ekspor produk ini mengalami peningkatan hingga pada tahun 2014 mencapai puncaknya dengan total ekspor mencapai 364151 ton (Forbil Institute, 2016). Perdagangan ekspor tekstil di Indonesia sendiri memang masih mengalami gelombang naik turun jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti Tiongkok. Selain itu tekstil yang menjadi komoditas unggulan ekspor Indonesia belum merata di segala jenis produk.

Selain itu, produk tekstil Indonesia dengan ekspor tertinggi juga dialami oleh produk setelan pakaian pria (HS 6203) dan produk pakaian wanita (HS 6204). Namun jumlah ekspor produk-produk tekstil ini masih rendah bila dibanding produk HS 5509. Pada grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah ekspor kedua produk ini tidak mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2007 hingga tahun 2016 dan memiliki nilai pendapatan yang mengalami fluktuasi sepanjang tahun.

Laju perdagangan tekstil di sektor impor juga mengalami pola fluktuatif dalam perannya pada pendapatan negara. Pada tahun 2012, hasil tekstil yang diimpor oleh Indonesia sebesar US\$ 6.805.461.648. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2013 sebesar US\$ 7.116.157 dan meningkat kembali pada tahun 2014 dengan jumlah US\$ 7.154.266.957. Naun penurunan angka terjadi pada tahun 2015 yang berjumlah US\$ menjadi US\$ 6.880.026.542 atau memiliki peran sebesar 6,32% dari impor hasil tekstil terhadap total impor hasil industri pada tahun yang sama

**Tabel 2.2 Data Impor Tekstil Indonesia Tahun 2014 – 2017**

Nilai dalam US\$

Hasil Industri	2014	2015	2016	2017	Peran th. 2017 (%)
1. Kain	4.234.328,53	4.025.959,24	4.127.237,16	4.124.933,74	3,33%
2. Benang	698.058,72	844.119,50	986.070,61	985.912,03	0,80%
3. Tekstil lainnya	718.831,44	721.545,80	753.395,65	768.957,47	0,62%
4. Serat	620.223,69	691.318,30	629.020,41	675.817,28	0,55%
5. Pakaian Jadi	246.668,33	276.164,26	339.768,03	322.467,55	0,26%

Sumber : Kementerian Perdagangan RI, 2017.

Tabel yang tertera diatas menunjukkan ranking lima besar tertinggi untuk komoditas produk tekstil yang diimpor Indonesia dari tahun 2014 hingga 2017. Posisi puncak impor tekstil ditempati oleh jenis produk kain yang diikuti dengan benang pada posisi kedua. Sedangkan posisi ketiga ditempati oleh produk tekstil lainnya serta disusul dengan serat lalu pakaian jadi. Kelima besar impor tertinggi

tersebut diambil dari 15 produk tekstil yang diimpor oleh Indonesia dari negara-negara lain seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.

*United Nations Industrial Development Organization* (2017), menyatakan bahwa saat ini Indonesia menduduki peringkat kesembilan dunia dalam produk *manufacturing value added* atau pertambahan nilai produk manufaktur tekstil. CEO dan Co-Founder 88Spares yang menyediakan layanan e-niaga asal Singapura, Hartmut Molzhan, Indonesia masih menduduki posisi penting sebagai produsen tekstil dan produk tekstil dengan mengambil pangsa pasar dunia sebesar 2%. Pernyataan lain juga disebutkan bahwa ekspor industri tekstil Indonesia tumbuh rata-rata 11% per tahun.

Selain fokus pada perdagangan tekstil baik ekspor maupun impor, Pemerintah juga sedang mengembangkan perlindungan merek tekstil nasional dengan mengajak Organisasi Hak Kekayaan atas Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organization*). Indonesia juga sedang mengupayakan keikutsertaan dalam Protokol Madrid, yakni protokol tentang sistem pendaftaran hak intelektual internasional.

Bagi negara mitra perdagangan terbesar Indonesia seperti Tiongkok, Indonesia merupakan pasar tekstil dan tujuan ekspor terbesarnya. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat, peningkatan impor tekstil dan produk tekstil dari Tiongkok sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir dan semakin melonjak setelah diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas pada 2010 lalu (Lestari S. , 2013). Peredaran produk tekstil yang digunakan untuk industri domestik di Indonesia saat ini memiliki presentase 70% berasal dari

produk impor yang sebagian besar datang dari Tiongkok. Ketua Umum API juga menjelaskan lebih lanjut bahwa tekstil yang beredar di Indonesia berasal dari impor negara lain.

Menurut pandangan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik tahun 2013, Natsir Mansyur, penyebab lemahnya daya saing produk dalam negeri karena tiga faktor yaitu lemahnya infrastruktur, buruknya sistem logistik serta sistem regulasi yang berbelit-belit. Tiga permasalahan yang terus menghamambat dunia usaha di Indonesia itu sampai saat inipun masih belum dapat ditindaklanjuti. Sehingga hal ini menimbulkan bumerang yang membuat daya saing produk nasional menjadi kalah saing dalam perdagangan internasional. Selama ketiga permasalahan yang sering menghambat dunia usaha itu masih belum dapat diatasi, maka produk-produk tekstil impor asal luar negeri masih akan beredar luas di Indonesia.

Jika kita pahami lebih lanjut, kualitas produk tekstil lokal jauh lebih baik dan memiliki nilai khusus yang tidak dimiliki oleh tekstil luar negeri. Keunggulan yang dimiliki produk tekstil lokal justru dapat menarik perhatian masyarakat internasional terhadap produk asli buatan Indonesia. Salah satu cara agar produk-produk tekstil dapat bersaing dengan tekstil impor adalah dengan melakukan pembenahan dan menuntaskan permasalahan tersebut sampai ke akarnya.

### **2.1.3 Perdagangan Tekstil antara Tiongkok dan Indonesia**

Salah satu negara ASEAN yang memperoleh keuntungan drastis dari perdagangan bebas antara ASEAN dan Tiongkok adalah Indonesia. Data statistik

perdagangan menunjukkan bahwa Indonesia selaku negara anggota ASEAN dengan populasi dan pasar terbesar memiliki hubungan perdagangan yang erat dengan Tiongkok, terlebih setelah berlakunya kesepakatan perdagangan ACFTA.

Data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2012 menyatakan bahwa Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia setelah ASEAN dengan total nilai perdagangan kedua negara mencapai US\$ 36,2 miliar pada tahun 2010 dan jumlah tersebut merupakan 12,4% dari total perdagangan Indonesia. Sementara itu, nilai perdagangan antara kedua negara selama periode 2006-2010 mencatat pertumbuhan positif rata-rata sebesar 30% (Setiawan, 2012).

**Tabel 2.3 Ekspor-Impor Tekstil Indonesia dengan Tiongkok Tahun 2010-2013**

Nilai dalam US\$

	2010	2011	2012	2013
Ekspor	300.891.793	388.376.669	448.159.775	573.084
Impor	1.687.288.565	2.306.053.345	2.398.329.197	2.541.513.240

Sumber : Pusdatin Kementerian Perdagangan RI, 2017

Hubungan perdagangan tekstil Indonesia dan Tiongkok dapat dilihat pada Tabel 2.3 yang menunjukkan arus ekspor dan impor pada tahun 2011 sampai 2013. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perdagangan tekstil antara kedua negara baik ekspor maupun impor mengalami peningkatan selama empat tahun berturut-turut. Hal ini semakin memberikan argumen kuat terhadap perdagangan tekstil kedua negara yang saling memberikan keuntungan satu sama lain.

Keseriusan kedua negara dalam membangun relasi perdagangan tekstil tertuang dalam penandatanganan Memorandum of Understanding on *Trade Cooperation in Textile and Clothing China* yang dilakukan oleh delegasi dari *Chamber of Commerce for Import and Export of Textiles (CCCT)* dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) guna meningkatkan kerja sama perdagangan tekstil dan pakaian jadi antara Indonesia dan Tiongkok.

Perjanjian ini ditandatangani oleh Ketua Umum API, Ade Sudrajat dan Ketua CCCT Wan Shenyang pada Oktober 2010 di Beijing, Tiongkok. Secara khusus perjanjian ini menyebutkan diperlukannya upaya bersama untuk menekan perdagangan ilegal dan *transshipment* ilegal, kerjasama promosi, fasilitasi perdagangan, tukar menukar data dan informasi serta undangan bagi investor Tiongkok untuk melakukan investasi di Indonesia (Fabry, 2010).

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Gusmardi Bustami, menjelaskan bahwa investasi di Indonesia akan menguntungkan bagi pihak Tiongkok dan Indonesia sendiri dalam mengembangkan basis perdagangan tekstil kedua negara. Pengembangan kualitas produksi tekstil di Indonesia tidak hanya memenuhi permintaan pasar domestik, namun juga memenuhi permintaan dari pasar internasional termasuk Tiongkok (ANTARA, 2012). Oleh karena itu, kesepakatan tersebut dapat menyeimbangkan skala perdagangan bilateral antara kedua negara terutama dalam industri tekstil.

Komoditas ekspor tekstil unggulan Indonesia ke Tiongkok berupa benang jadi. Sedangkan komoditas impor tekstil Tiongkok yang masuk ke Indonesia berupa produk jadi seperti kain maupun pakaian yang siap pakai. Namun



perdagangan tekstil antara kedua negara ini tidak serta merta berjalan mulus. Asosiasi Tekstil Tiongkok mencatat dari total nilai perdagangan tekstil antara kedua negara senilai US\$ 1,7 miliar, Indonesia mengalami defisit hingga US\$ 1,4 miliar. Jika dibandingkan, industri tekstil Indonesia lebih unggul di sektor benang dan serat dibanding Tiongkok yang lebih unggul di sektor kain.

**Tabel 2.4 Perbandingan Faktor Pendukung Daya Saing Industri Tekstil Indonesia dengan Tiongkok**

Indikator	Indonesia	Tiongkok
Bahan baku (Kapas)	Masih diimpor dari negara penghasil kapas antara lain karena mutu kapas dalam negeri belum dapat memenuhi syarat kualitas	Dipasok dari hasil pertanian dalam negeri dan masih impor dari negara lain
Tenaga Kerja	Jam Kerja : 40 jam/minggu Hari Kerja : 337 hari Gaji : US\$ 0,65/jam	Jam Kerja : 44-48 jam/minggu Hari Kerja : 347-350 hari Gaji : US\$ 0,55-0,85/jam
Energi Listrik	Tarif : US\$ 0,08/kWh Supply tidak kontinyu sehingga ada penambahan biaya	Tarif : US\$ 0,09/kWh Supply stabil
Mesin & Peralatan Industri	>20 tahun dan baru 6% dilakukan program restrukturisasi dari pemerintah tahun 2007	<10 tahun dan telah melakukan peremajaan mesin sejak 2000

Sumber : Dirjen ILMTA, Kementerian Perindustrian, 2010.

Tabel 2.4 diatas menunjukkan faktor perbandingan antara industri tekstil Tiongkok dan Indonesia yang dapat mempengaruhi perdagangan antara kedua negara. Dapat dianalisis bahwa dari segi bahan baku, tenaga kerja, energi, dan mesin tekstil sendiri memang Indonesia masih kalah jauh dengan kondisi di

Tiongkok. Dukungan pemerintah juga sangat mempengaruhi laju industri tekstil ini yang mempengaruhi perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok dari segi hasil pengolahan hasil industri tersebut.

Tiongkok merupakan negara yang menggunakan teknologi tinggi dalam produksi, sehingga investasi asing banyak masuk dan dapat menekan harga produknya. Hal tersebut menyebabkan produk impor Tiongkok baik resmi maupun ilegal berada pada harga relatif lebih murah dan memiliki kualitas lebih baik dibandingkan dengan produk tekstil Indonesia (Muchlas, 2014).

Kondisi ketimpangan ini diperparah dengan adanya penyelundupan yang menyebabkan perdagangan tekstil domestik yang semakin tertekan. Sebuah laporan di pelabuhan muat mencatat, impor pakaian jadi selama periode Januari hingga September 2011 mencapai US\$ 125,39 juta. Jumlah tersebut naik 37,37% dibandingkan periode yang sama di tahun 2010 yang hanya sebesar US\$ 91,28 juta.

Meskipun terjadi ketimpangan dalam nilai perdagangan tekstil, korelasi perdagangan antara kedua negara juga saling berhubungan. Sebagai contoh pada tahun 2011, produksi tekstil Tiongkok menurun hingga 1,8% dan dampaknya dapat dirasakan Indonesia yaitu dengan bertambahnya permintaan tekstil dari pasar dunia. Namun industri tekstil Indonesia yang belum sebesar Tiongkok menyebabkan produksi tekstil Indonesia tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa perdagangan tekstil antara Tiongkok dan Indonesia sangat berhubungan baik dalam konstelasi pasar internasional maupun dalam memenuhi kebutuhan domestik masing-masing negara.

#### **2.1.4 Perdagangan Tekstil antara Tiongkok dan ASEAN**

Saat ini perdagangan bebas yang terjadi antara ASEAN dan Tiongkok tercatat sebagai perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia jika dilihat dari jumlah populasi negara-negara yang terlibat. Sejak pertama kali dibentuk tahun 1991, kerjasama perdagangan bebas kawasan ini telah memperkuat hubungan dagang Tiongkok dengan ASEAN yang menjadikan posisi Tiongkok dikukuhkan menjadi mitra wacana ASEAN pada tahun 1996.

Sampai saat ini, Tiongkok tercatat sebagai mitra dagang terbesar ASEAN selama delapan tahun terakhir. Kerjasama antara kedua belah ini memiliki jumlah yang selalu meningkat setiap tahunnya. Seperti yang terlihat di tahun 2009 ketika ekspor ASEAN ke Tiongkok meningkat sebesar 39,1% dari US\$ 81,6 miliar menjadi US\$113,5 miliar di tahun 2010. Hal tersebut menjadikan Tiongkok sebagai tujuan ekspor kedua terbesar ASEAN. Sedangkan bagi Tiongkok, ASEAN merupakan mitra dagang terbesar keempat yang dapat dilihat dari 9,8% total perdagangannya (Kementerian Luar Negeri RI, 2012).

Pada tahun 2014, Administrasi Umum Bea Cukai Tiongkok menyatakan bahwa dalam tiga triwulan awal tahun 2014 volume perdagangan bilateral antara Tiongkok dan ASEAN mencapai 2,13 triliun Yuan RMB, meningkat 6% daripada periode yang sama tahun sebelumnya, dan menempati 11% dari total volume impor dan ekspor Tiongkok. Menurut data yang diumumkan badan tersebut, dalam tiga triwulan awal tahun ini, ASEAN menjadi mitra perdagangan Tiongkok terbesar ketiga setelah Uni Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini semakin

menunjukkan bahwa perdagangan bebas antara dua pihak mendatangkan keuntungan yang cukup signifikan bagi perekonomian masing-masing negara.

Kerjasama perdagangan yang progresif selama hampir dua dekade tersebut juga terjadi pada perdagangan tekstil. Seperti yang diketahui, Tiongkok merupakan eksportir tekstil terbesar di Asia yang memiliki sumber daya maupun kualitas bahan baku tekstil yang unggul dari negara Asia lainnya.

**Tabel 2.5 Impor Tekstil Tiongkok ke Negara-Negara ASEAN**

Nilai dalam Ribu US\$

Negara	Impor dari Tiongkok			
	2010	2011	2012	2013
Thailand	730.788	910.399	1.059.795	1.271.136
Vietnam	2.260.057	3.441.924	5.761.314	7.571.847
Singapura	709.903	983.000	1.167.223	1.672.234
Malaysia	1.301.187	1.301.187	1.301.187	1.301.187
Kamboja	469.926	727.417	852.027	1.107.904
Philiphina	982.579	1.296.286	1.534.897	1.661.703
Laos	74.337	5.878	15.188	10.148
Myanmar	112.999	158.540	190.734	164.845
Brunei D.	15.727	49.990	80.377	164.845

Sumber : UN COMTRADE statistics [www.trademap.org](http://www.trademap.org), 2016.

Data-data impor tekstil dari Tiongkok yang disebutkan pada Tabel 2.5 diatas dapat memberikan informasi bahwa pengaruh perdagangan tekstil antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN berjalan stabil. Hampir seluruh negara-negara ASEAN mengimpor tekstil dari Tiongkok tanpa pengecualian, mulai dari

Laos yang memiliki jumlah nilai impor yang paling sedikit diantara negara ASEAN lainnya sampai Malaysia yang memiliki posisi puncak sebagai negara pengimpor tekstil Tiongkok. Data yang menyebutkan dari tahun 2010 sampai 2013 tersebut memberikan bukti bahwa meskipun nilai impor tekstil dari Tiongkok mengalami naik turun yang cukup fluktuatif, namun diantara kedua pihak saling mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan.

## **2.2 Penyelundupan Tekstil Asal Tiongkok ke Indonesia Melalui Pelabuhan Batam**

Kasus penyelundupan tekstil yang terjadi di Indonesia memiliki berbagai macam cara masuk dan modus yang dapat mengelabui aparat penegak hukum. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono (2014), mengatakan beberapa alasan masih dijalankannya praktik penyelundupan karena tingginya permintaan terhadap produk-produk tertentu yang seringkali merupakan produk terlarang, terbatas, atau perbedaan harga yang cukup tinggi antara produk yang diimpor resmi dengan yang diselundupkan. Selain itu, maraknya aksi penyelundupan didukung dengan menjamurnya pelabuhan-pelabuhan target penyelundupan atau yang biasa dikenal sebagai pelabuhan tikus di hampir seluruh wilayah pesisir di tanah air.

Salah satu cara yang sampai saat ini selalu menjadi pintu masuk paling mudah bagi penyelundupan tekstil asal Tiongkok yaitu melewati pelabuhan ilegal yang berada di Batam, Kepulauan Riau. Menurut Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) KPU Bea Cukai Tipe B Batam, Akhiyat Mujayin (2016),

penyelundupan tekstil asal Tiongkok yang masuk ke wilayah Indonesia melalui wilayah Batam sangat sulit diberantas. Hal ini disebabkan karena jumlah pelabuhan tidak resmi atau ilegal yang ada di kawasan Batam lebih dari 64 pelabuhan. Pelabuhan ilegal yang biasa disebut pelabuhan tikus ini bahkan cenderung bertambah disamping dilindungi masyarakat setempat.

Dari sekian banyak pelabuhan yang ada di Batam, terdapat 25 pelabuhan yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Batam (2008). Bahkan status kepelabuhanan yang ada masih perlu dibenahi agar sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam UU.No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran juncto UU.No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran atau PP.No.69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Bea Cukai Batam, 2016).

Data yang terhimpun menunjukkan bahwa dari 64 titik pelabuhan ilegal tersebut, termasuk diantaranya pelabuhan yang biasanya digunakan masyarakat untuk aktivitas perekonomian skala kecil. Barang-barang selundupan seperti tekstil yang tidak dilengkapi dokumen ekspor-impor dan kepabeanan setiap hari keluar masuk ke Batam. Penindakan yang dilakukan oleh aparat setempat hanya sebagian kecil dari maraknya praktik penyelundupan tekstil yang terjadi di pelabuhan tikus Batam. Selain itu, dari beberapa kasus penyelundupan tekstil yang ditemukan oleh aparat yang berwenang, diketahui beberapa modus penyelundupan produk tekstil asal Tiongkok. Diantaranya dilakukan melalui pelabuhan kecil, pergeseran nomor *Harmony System* (HS) dan juga melalui pelabuhan resmi di *Free Trade Zone* kawasan pelabuhan Batam yaitu pelabuhan Batam, Bintan, dan Karimun.

Zaenuddin, dkk (2009), menyatakan bahwa pencanangan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana yang dituangkan dalam UU No.36 tahun 2000 yang diubah dengan UU No.44 tahun 2007 serta PP No.2 tahun 2009 seharusnya digunakan dengan cara bijaksana dalam melaksanakan praktik ekspor impor barang sebagai penunjang perekonomian negara. *Free Trade Zone* dan *Free Port* yang ditetapkan di kawasan Batam justru masih menimbulkan sejumlah pelanggaran di bidang perdagangan ekspor impor sejumlah barang termasuk jenis tekstil. Seharusnya penerapan *Free Trade Zone* dan *Free Port* yang memiliki payung hukum yang kuat serta menjadi hukum positif harus ditegakkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan guna menghindari sejumlah kecurangan seperti penyelundupan barang.

Fakta di lapangan juga menyebutkan bahwa penyelundupan tekstil yang terjadi di Batam dengan mudah lolos dari pemeriksaan aparat yang mengakibatkan barang-barang tekstil selundupan asal Tiongkok tersebar di seluruh pusat perdagangan tekstil di Indonesia. Staf Khusus Menteri Perindustrian yang juga pengusaha tekstil dan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Benny Sutrisno (2013) menyayangkan hal tersebut mengingat lokasi pelabuhan di Batam tidak termasuk ke dalam pelabuhan yang diizinkan untuk importasi tekstil. Padahal jumlah pintu masuk impor tekstil di Indonesia baik dari laut maupun udara cukup memadai. Saat ini pelabuhan yang memiliki izin untuk importasi tekstil ialah Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Medan), Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan

Tanjung Emas (Semarang). Sedangkan jalur udara terdapat Bandara Soekarno-Hatta (Tangerang), Bandara Ngurah Rai (Bali), dan Bandara Djuanda (Surabaya).

### **2.2.1 Kasus Penyelundupan Tekstil dari Tiongkok ke Indonesia sebelum penerapan *High Sensitive List* ACFTA**

Kasus penyelundupan tekstil asal Tiongkok yang terjadi di Indonesia mulai naik ke permukaan pada tahun 2006. Menurut pernyataan resmi Kepala Kepolisian Resor Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3) Tanjungpriok, Luki Hermawan (2006), impor tekstil ilegal dalam dua tahun terakhir sejak 2005 mulai meningkat. Produk tekstil selundupan yang berhasil ditindak oleh Kepolisian tersebut berjumlah 110 karung yang diselundupkan dengan modus sebagai kain potong milik perorangan. Setelah dibuka ternyata berisi kain utuh yang masih dalam bentuk roll dan belum dipotong.

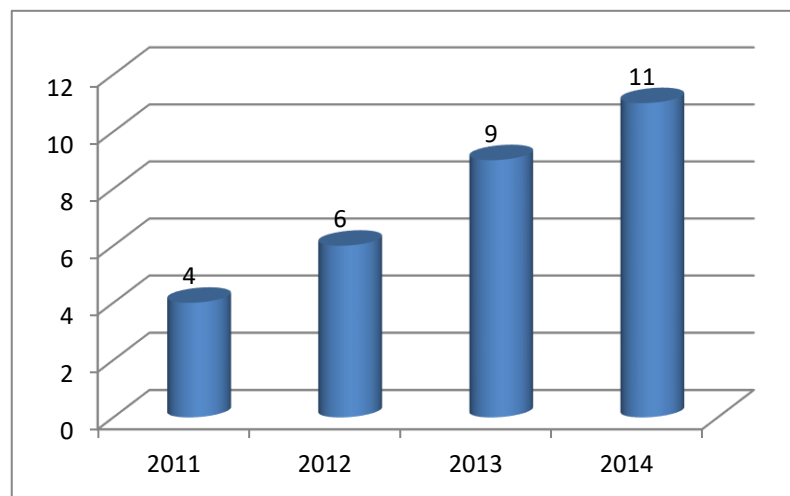
Barang-barang tekstil selundupan tersebut masuk ke kawasan berikat yang berada di pelabuhan ilegal Batam setelah sempat singgah di Singapura. Pada saat memasuki kawasan pelabuhan ilegal di Batam, produk tekstil itu lalu dikemas dalam paket lebih kecil. Saat melakukan proses tersebut di kawasan pelabuhan ilegal Batam, barang tersebut tidak terdeteksi dan lolos sampai di pelabuhan utama Tanjungpriok, Jakarta. Dugaan polisi menyebutkan bahwa para pelaku mengecoh aparat penegak hukum dengan modus perdagangan antar pulau.

Setelah lolos dari pengawasan di pelabuhan ilegal Batam, tekstil ilegal tersebut masuk ke pelabuhan Tanjungpriok lalu dijemput untuk didistribusikan ke pusat perdagangan tekstil di Pulau Jawa, seperti kawasan Mangga Dua, Jakarta



Barat, Tanahabang, dan Pasar Baru, Bandung, Jawa Barat. Parahnya, produk impor menguasai lebih dari 60% barang yang dijual di berbagai pusat perdagangan tekstil tersebut. Harganya yang lebih murah hingga 40% dari produk lokal membuat sebagian besar pengusaha tekstil rugi dan kalah bersaing dengan tekstil hasil selundupan dari negeri tirai bambu (Hidayat, 2006).

**Tabel 2.6 Jumlah Kasus Penyelundupan Tekstil Asal Tiongkok di Pelabuhan Batam 2011-2014**



*Sumber : Direktorat Jenderal Bea Cukai Tipe B Batam, 2016.*

Data kasus penyelundupan tekstil asal Tiongkok yang tertera pada Tabel 2.6 menunjukkan dari tahun 2011 sampai tahun 2014 masih terus terjadi penyelundupan yang masuk ke Indonesia melalui pelabuhan Batam dan mendapat perhatian khusus dari DJBC Tipe B Batam. Kasus-kasus penyelundupan tekstil yang setiap tahun semakin marak ditemukan di pelabuhan Batam menjadikan DJBC Batam semakin giat melakukan patroli penindakan penyelundupan yang terjadi, mengingat kain-kain tekstil ilegal ini telah memperpuruk industri tekstil domestik dan membuat pangsa pasar tekstil domestik turun menjadi 29%.

Tindakan operasi penyelundupan tekstil tersebut masih terus berlanjut hingga tahun berikutnya. Pada tahun 2011, dari total 4 kasus penyelundupan yang terjadi di pelabuhan Batam yang merugikan negara sebesar Rp 3,093 miliar, Kasus penyelundupan tekstil ini terus naik sampai tahun 2014 yang mengakibatkan total kerugian negaranya naik menjadi Rp 43,314 miliar (Fajarwati, 2009).

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkapkan, menjelang lebaran tahun 2011 lalu terdapat 200 kontainer berisi produk tekstil diselundupkan. Tekstil yang diselundupkan di salah satu pelabuhan ilegal Batam ini diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 100 miliar. Info lebih lanjut menyebutkan bahwa masih terdapat 197 kontainer tekstil ilegal di pelabuhan Tiongkok dan Singapura yang siap diberangkatkan ke Indonesia.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat, memperkirakan bahwa penyelundupan tekstil asal Tiongkok yang masuk ke pasar domestik selama periode Januari hingga Juli 2011 dapat mencapai US\$ 500 juta. Pihak API sendiri telah mengetahui kasus tersebut pada saat mengadakan pertemuan dengan asosiasi tekstil di Tiongkok beberapa waktu lalu. Dari laporan perdagangan antar dua negara, nilai perdagangan tekstil selama bulan Januari hingga Juli 2011 mencapai angka US\$ 1,7 miliar, sedangkan berdasarkan laporan dan data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia hanya berjumlah US\$ 1,2 miliar.

Data-data yang dimiliki oleh asosiasi tekstil Tiongkok tersebut diperoleh dari setiap pelabuhan Tiongkok yang bertujuan ke Indonesia. Dari ketimpangan

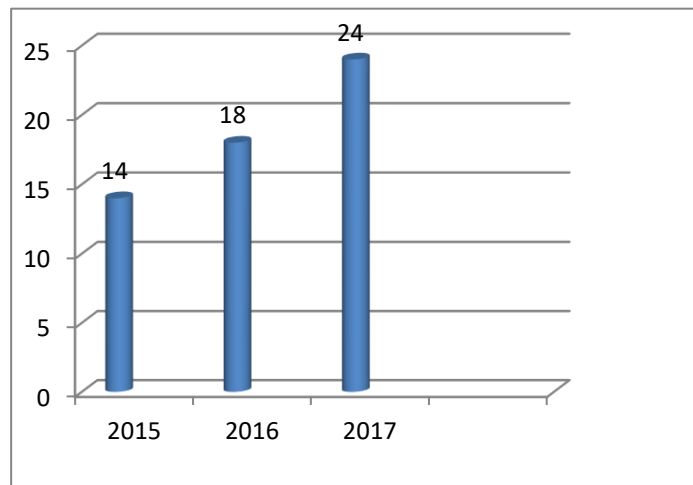
data kedua negara yang telah dijelaskan sebelumnya, terjadi transaksi perdagangan yang tidak terdeteksi dan penyelundupan dengan jumlah yang sangat besar. Kasus penyelundupan ini juga diperkirakan dibiarkan oleh pihak yang berwenang karena sampai saat ini kasus penyelundupan masih terus terjadi.

Penyelundupan tekstil yang dilakukan oleh Tiongkok di Indonesia sebetulnya sering dikeluhkan oleh pelaku usaha tekstil, namun pemerintah sampai saat ini tidak memperlihatkan kinerja yang efektif dalam memberantas kasus yang dapat merugikan negara ini. Pengawasan terhadap barang-barang tekstil yang diimpor dari Tiongkok melalui pelabuhan kurang mendapatkan perhatian maksimal oleh pihak yang berwajib.

### **2.2.2 Kasus Penyelundupan Tekstil dari Tiongkok ke Indonesia Setelah Penerapan *High Sensitive List* ACFTA**

Penerapan perjanjian perdagangan bebas ACFTA dengan pihak Tiongkok sejatinya memberikan harapan besar kepada pertekstilan Indonesia khususnya laju perdagangan tekstil agar tidak terjadi kecurangan lagi dan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Namun sayangnya penerapan ACFTA khususnya pada regulasi *High Sensitive List* yang mengurangi pajak dan tarif tekstil sebanyak 0-50% pada tahun 2015, masih belum dapat membendung penyelundupan barang-barang impor tekstil asal Tiongkok yang masuk melalui pelabuhan Batam.

**Tabel 2.7 Jumlah Kasus Penyelundupan Tekstil Asal Tiongkok di Pelabuhan Batam 2015-2017**



*Sumber : Direktorat Jenderal Bea Cukai Tipe B Batam, 2018.*

Data yang tertera pada Tabel 2.7 menunjukkan peningkatan kasus penyelundupan tekstil asal Tiongkok yang terjadi dari 2015 sampai 2017 dengan angka yang terus meningkat. Menurut Kepala Bidang Bea dan Cukai Tipe B Batam, Raden Evy (2017), penyelundupan ini bernilai puluhan miliar rupiah dan mendatangkan kerugian negara.

Salah satu contoh penindakan kasus penyelundupan tekstil asal Tiongkok dilakukan pada tahun 2015 yang melibatkan pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJCB) bekerjasama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebanyak empat kontainer berisi produk tekstil ilegal yang diselundupkan langsung dari Tiongkok berhasil diamankan pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti. Penindakan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pengembangan kasus penyelundupan sebelumnya, yakni penggunaan fasilitas kawasan berikat PT KHYI. Dalam penindakan tersebut terbukti bahwa PT KHYI terbukti kembali melakukan pelanggaran, yaitu dengan mengimpor kain gulungan impor dari

Tiongkok sebanyak 4 kontainer melalui pelabuhan ilegal. Sementara nilai impor tekstil ilegal ini senilai Rp 14 miliar dan negara telah dirugikan sekitar Rp 2,3 miliar karena tak bayar bea masuk impor (Idris, 2015).

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga (KIAL), Robert Leonard Marbun (2016), menyatakan bahwa pada periode 1 Januari hingga awal Juni 2016 terdapat 216 jumlah kasus penyelundupan komoditas tekstil dan produk tekstil yang berhasil ditindak oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. 216 kasus penyelundupan tersebut berhasil diungkap oleh pihak terkait melalui Operasi Gerhana yang melibatkan sejumlah unsur, antara lain Kanwil Bea Cukai di seluruh Sumatera serta didukung Pangkalan Kapal Tanjung Balai Karimun dan Batam.

Penindakan juga dilakukan di kawasan Selat Malaka yang jalur pelayarannya juga singgah di pelabuhan Batam. Tahun 2016, Bea Cukai Batam berhasil menindak 161 kasus penyelundupan tekstil, naik 3 kali lipat dibanding tahun 2015 (Nurhayat, 2017). Menurut keterangan DJBC, salah satu kasus penyelundupan tekstil yang berhasil ditindak memiliki modus tidak memasukkan komoditas tekstil ke dalam kawasan berikat, namun dipindahkan ke pihak lain dan menyerahkan pemberitahuan pabean atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Pada bulan Juli 2017, Kepolisian kota Batam dan Bea Cukai Batam berhasil melakukan penindakan penyelundupan tekstil asal Tiongkok yang membawa 3 kontainer yang berisi 55 ton bahan tekstil bekas asal Tiongkok. Tekstil ilegal ini diselundupkan melalui pelabuhan Batu Ampar, Kota Batam.

Barang ini akan dikirim ke Jakarta dan Surabaya yang akan dijadikan bahan baku pakaian. Bahan tekstil ilegal yang didatangkan dari Tiongkok ini dibeli seharga US\$ 1 per kilo dan dijual kembali di Indonesia sebesar US\$ 1,5. Jika dihitung maka keuntungan pelaku penyelundupan ini yaitu sebesar Rp 1 miliar lebih.

Modus penyelundupan tersebut menggunakan jalur hijau untuk memasukkan tekstil dari Tiongkok tersebut. Proses impor tersebut dianggap legal karena pelaku penyelundupan menggunakan nama perusahaan tempat pelaku bekerja yang merupakan perusahaan garmen. Pihak Kepolisian menyebutkan bahwa proses pengirimannya tidak ada yang salah, namun ada indikasi oknum pegawai perusahaan yang bermain (Mulyana, 2017).

Kepala Biro Layanan Informasi Kantor Bea dan Cukai Batam, Susila Brata (2013) menyesalkan aksi penyelundupan tekstil yang hingga saat ini masih marak terjadi di pelabuhan sekitar Batam. Sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas mestinya aksi penyelundupan di Batam sudah tidak ada lagi karena pengusaha dibebaskan untuk ekspor dan impor barang tanpa dikenakan pajak dan bea apapun.

Kemudahan akses yang diberikan tidak dijalankan dengan semestinya oleh para pengimpor barang-barang khususnya tekstil yang masuk ke kawasan pelabuhan Batam. Selain itu kondisi pelabuhan-pelabuhan bebas dan ilegal yang tidak memiliki ijin sebagai pelabuhan pintu masuk barang impor masih tersebar di hampir seluruh perairan di Batam dan sekitarnya. Hal ini jelas menjadi perhatian khusus pemerintah maupun pihak terkait untuk memberantas kejahatan yang tidak

hanya melibatkan satu negara dan pihak saja, namun bersifat transnasional baik antar negara maupun antar pihak dan aparat yang berwenang.

Selain data diatas, pernyataan Redma Gita Wirawasta, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) (2017), menyebutkan bahwa impor tekstil dan produk tekstil ilegal pada tahun 2016 lalu diperkirakan mencapai 310.000 ton dengan nilai mencapai Rp16 triliun. Jumlah tersebut didapat dari total konsumsi masyarakat pada tahun 2016 sebesar 1,86 juta ton dikurangi dengan penjualan produk lokal di pasar domestik sebesar 1,4 juta ton dan impor produk impor ilegal 151.000 ton. APSyFI menganalisa bahwa setiap bulan sekitar 1000 kontainer barang impor ilegal masuk ke pasar domestik. Selain kain, produk tekstil yang diselundupkan ini berupa serat, benang, dan garmen (Yanuar, 2017).

Dari data-data dan kasus penyelundupan tekstil asal Tiongkok yang telah disebutkan sebelumnya, terbukti bahwa kasus penyelundupan tekstil masih terjadi walaupun sudah diterapkan *High Sensitive List* ACFTA yang mengakibatkan barang impor dikenai penurunan tarif mulai 0%-50%. Semakin tingginya kasus penyelundupan tekstil yang berhasil ditindak setiap tahun oleh aparat berwenang justru membuktikan bahwa praktik kejahatan perdagangan dan penyelewengan peraturan masih terjadi. Kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus penyelundupan tekstil asal Tiongkok di Batam tersebut juga semakin memunculkan pertanyaan mengenai keefektifan dari diberlakukannya perjanjian ACFTA antara Indonesia dan Tiongkok.